



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN FORUM MUSYAWARAH DUSUN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM
PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KECAMATAN
SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

(Studi kasus Desa Bandar Padang)

SKRIPSI

(Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum)



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh:

MUHAMMAD ADNAN
NIM: 11527103078

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020 M/1442 H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

: PELAKSANAAN FORUM MUSYAWARAH DUSUN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM
PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KECAMATAN
SIBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU (STUDI KASUS DESA
BANDAR PADANG)

: MUHAMMAD ADNAN
: 11527103078
: ILMU HUKUM

Disahkan dimunaqasyahkan pada :

Tanggal / Tanggal : Selasa / 16 Juni 2020
Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2020
Tim Penguji



1. Dr. H. Hajar, M.Ag
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)

2. Basir, SHI., MH.
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)

3. Dr. Muhammad Darwis, SH., MH
(Anggota Penguji)

4. Nur Hidayat, SH., MH
(Anggota Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dianggotakan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggotakan mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul *"Pelaksanaan Forum Musyawarah Dusun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus Desa Bandar Padang)"*

Nama : MUHAMMAD ADNAN
NIM : 11527103078
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat di terima dan di setuju untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Mei 2020

Pembimbing Skripsi

Muslim S. Ag., SH., M. Hum

NIP. 197205052014111002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Dalam forum musyawarah dusun ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif. Dimana dalam pelaksanaannya telah dilimpahkan kepada Forum Musyawarah Dusun (MusDus).

Masalah pokok dalam penelitian ini mengenai Pelaksanaan Forum Musyawarah Dusun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Kecamatan Seberida Kabupaten Inragiri Hulu (Studi Kasus Desa Bandar Padang).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya yaitu tergolong kedalam jenis penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian, sedangkan sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Kemudian Jumlah informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak dapat ditetapkan, proses penelitian berlangsung dari satu informan ke informan lainnya. Bermula dari penanggung jawab dalam menerapkan dan menjalankan kebijakan yaitu forum musyawarah dusun (musdus), Bupati Indragiri Hulu, Kantor Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Kantor Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Dusun Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan forum musyawarah dusun banyak kendala yang terjadi dilapangan kurangnya sosialisasi peraturan tersebut dari pihak desa maupun pihak yang bersangkutan yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak paham tentang pentingnya forum musyawarah dusun ini bahkan ada masyarakat yang tidak tahu menahu tentang forum musyawarah dusun ini. Tempat pelaksanaan forum ini yang terbilang tidak menentu yang membuat banyaknya anggota dari forum musyawarah dusun ini malas untuk menghadiri kegiatan tahunan ini. Serta anggaran yang tidak pasti untuk melaksanakan forum juga hal penting yang terkadang gagalnya dilaksanakan forum musdus ini. Sebaiknya hal-hal yang menyebabkan forum ini gagal dilaksanakan harus di perbaiki oleh pihak terkait agar pelaksanaannya berjalan dengan semestinya. Dengan adanya informasi dan sosialisasi yang baik dan tepat, maka suatu kebijakan akan tersampaikan dan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi. Sholawat besertakan salam tidak lupa pula penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi panutan bagi setiap umat muslim.

Penulisan skripsi ini di selesaikan penulis sebagai upaya terakhir penulis dalam mendapatkan gelar akademik Strata I (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pembelajaran, Pengabdian, dan Penelitian. Adapun judul skripsi ini adalah **“Pelaksanaan Forum Musyawarah Dusun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus Desa Bandar Padang)”**. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan-kekurangan, kekhilafan yang dilakukan penulis baik dari segi penulisan maupun dari segi substansi yang terdapat di dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis berharap kepada para pembaca nantinya dapat memberikan koreksi yang bersifat membangun guna penyempurnaan dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ayahanda Sugiyanto, Ibunda Suparmi dan keluarga yang memberikan dorongan, motivasi dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Prof Dr. K.H. Akhmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta para Wakil Dekan I, II, dan III;
4. Bapak Firdaus S.H. M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, serta Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Bapak Muslim S.Ag, S.H., M.Hum;
5. Bapak Muslim S.Ag. S.H., M.Hum, selaku Pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dari awal proposal hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ilham Akbar S.H.I, M.H., selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, ilmu serta waktu yang diluangkan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu.
 8. Bapak/Ibu Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu melayani pengurusan administrasi penulisan.
 9. Bapak/Ibu Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu melayani dan memberikan penulis kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan.
 10. Teman seperjuangan G10 Squad: Jumfitriadi, Maraden Kasuma Hasibuan, M. Prabowo Wiguna, M. Zulfan Arif, Muhammad Ali, Massidik Siregar, Ramlan Pulungan, Sulaiman.
- Semoga bantuan yang diberikan menjadi amal shalih disisi Allah SWT, dan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi insan akademik dimanapun berada, Amin.

UIN SUSKA RIAU
Pekanbaru, 03 April 2020
Penulis

Muhammad Adnan
NIM. 11527103078



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSetujuan PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Dan Manfaat Peneitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Bandar Padang	17
B. Demografi	20
C. Keadaan Sosial	21
D. Kondisi Ekonomi	25
E. Kondisi Pemerintahan Desa	27
a) Pembagian Wilayah Desa	27
b) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A.	Teori Pemerintahan Daerah	30
1.	Pengertian Pemerintahan Daerah	30
2.	Kewenangan Pemerintahan Daerah	32
B.	Teori Demokrasi	34
1.	Dasar Teori Demokrasi Versi Hans Kelsen	34
2.	Demokrasi Dan Kompromi Dalam Pemikiran Hans Kelsen	37
3.	Prinsip Keterwakilan Masyarakat Dalam Lembaga Politik	40
C.	Teori pembangunan partisipatif	44
1.	Pembangunan	44
2.	Pembangunan partisipatif	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Pelaksanaan forum musyawarah dusun berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang sistem pengelolaan pembangunan partisipatif kecamatan seberida kabupaten indragiri hulu (studi kasus desa bandar pandang)	48
B.	Faktor penghambat Pelaksanaan forum musyawarah dusun berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang sistem pengelolaan pembangunan partisipatif kecamatan seberida kabupaten indragiri hulu (studi kasus desa bandar pandang)	54

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	59
----	------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi Dan Sampel.....	12
Tabel II.1	Nama Aparat Desa Bandar Padang	28
Tabel II.2	Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa	29



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Begitulah Indonesia, dimana Negara yang terdiri dari satu-kesatuan yang memiliki 34 Provinsi dan satu ibu kota Pusat. Indonesia pada awalnya merupakan negara yang memakai sistem pemerintahan sentralisasi. Bahkan Indonesia pernah mengalami sistem pemerintahan yang begitu sentralistik, yakni pada era Orde Baru.¹ Melalui perubahan filosofi “otonomi daerah yang seluas-luasnya” di undang-undang sebelumnya kemudian menjadi “otonomi yang nyata dan bertanggung jawab”. Pada masa itu Orde Baru menganggap kebijakan tidak lain untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan integrasi bangsa.²

Selama berlangsungnya pemerintahan Orde Baru, daerah tidak dapat berkembang secara optimal karena sistem politik dan ekonomi yang dibangun pemerintah Orde Baru sangat sentralistik. Segala kebijakan tentang daerah selalu diputuskan oleh Pusat. Daerah tidak memiliki keleluasaan untuk mengembangkan potensi daerahnya, bahkan akhirnya menjadi sangat tergantung dengan pusat.

Setelah pemerintah orde baru mengakhiri masa pemerintahannya, pada tanggal 20 Mei 1998 karena gerakan reformasi, kemudian disusul dengan percepatan pemilu di tahun 1999, Undang-Undang Dasar 1945

¹ Nyimas Latifah Letty Aziz dan R. Siti Zuhro, *Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Bogor Indonesia, 2018), h. 64.

² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UUD 1945) yang selama pemerintahan orde baru disakralkan dan tidak dapat diubah oleh MPR sekalipun, pada tanggal 19 Oktober 1999 untuk pertama kali UUD 1945 diamandemen. Melalui sidang umum MPR tahun 1999, ada 9 Pasal yang diubah. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2000, MPR melalui sidang tahunan menyetujui untuk melakukan perubahan kedua (2) terhadap UUD 1945 dengan mengubah dan/atau menambah terkhusus di bab VI pemerintahan daerah dimana pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, Pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Untuk urusan yang diserahkan kepada daerah otonom itu sendiri, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan terkait dengan penciptaan daya saing daerah. Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar,

³ HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi: pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kependudukan dan catatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik dan arsip.⁴

Dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dari penjelasan Pasal 18 ayat (6) ini bahwa dalam segala hal yang berhubungan tentang otonomi ataupun tugas pembantuan yang terdapat di daerah. Daerah berhak membuat peraturan yang dapat mensejahterakan daerahnya tersebut. Hal ini juga yang terdapat di daerah Provinsi Riau terkhususnya yaitu daerah Kabupaten Indragiri Hulu dapat membuat peraturan daerah sesuai dengan kondisi daerahnya tersebut.

Perubahan pemerintah daerah dengan semangat otonomi daerah merupakan paradigma pemerintahan yang perlu diamati melalui sejarah dan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah yang pernah diterbitkan. Melalui pendekatan paradigmatis, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa. Konsep ini dikaitkan

⁴ Suprawoto, *Government Public Relations Perkembangan dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta : Pranadamedia Group, 2018), h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan paradigma Thomas Kuhn dalam *The Structure of Scientific Revolution*. Menurut Fakih, paradigma diartikan sebagai satu kerangka referensi atau pijakan suatu teori. Untuk mengetahui dan memahami berkembang maupun runtuhnya suatu teori perubahan sosial dan pembangunan, perlu dilihat persoalan yang dihadapi oleh paradigma masing-masing yang menjadi landasan teori itu. Konstelasi ini dikembangkan untuk memahami kondisi sejarah dan keadaan sosial dan memberikan kerangka konsepsi dalam memaknai realitas sosial.⁵

Menurut Blakely, ada 6 tahap dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Tahapan tersebut meliputi: (1) pengumpulan dan analisis data; (2) pemilihan strategi pembangunan daerah; (3) pemilihan proyek-proyek pembangunan; (4) pembuatan rencana tindakan; (5) penentuan rincian proyek; (6) persiapan perencanaan secara keseluruhan dan implementasi.⁶

Dalam hal pembangunan di Desa, maka pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif. Dimana tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Daerah ini ialah, untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses pengelolaan pembangunan partisipatif. Berjalannya suatu roda pemerintahan dan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab

⁵ Paimin Napituulu, *Menakar Urgensi Otonomi Daerah*, (Bandung : PT. Alumni, 2012), h.

⁶ Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2014), h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah, akan tetapi seluruh elemen masyarakat juga terlibat didalamnya. Untuk membangun suatu Desa diperlukannya pembangunan partisipatif, dimana suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kelurahan bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya diwilayah indonesia.

Menurut Soetomo, pembangunan masyarakat dilihat dari mekanisme perubahan dalam rangka mencapai tujuannya, kegiatan pembangunan masyarakat ada yang mengutamakan dan memberikan penekanan pada bagaimana prosesnya sampai suatu hasil pembangunan dapat terwujud, dan adapula yang lebih menekankan pada hasil material, dalam pengertian proses dan mekanisme perubahan untuk mencapai suatu hasil material tidak begitu dipersoalkan, yang penting dalam waktu relatif singkat dapat dilihat hasilnya secara fisik. Pendekatan yang pertama juga disebut sebagai pendekatan yang memprioritaskan jalan dan lebih menekankan pada faktor individunya, sedangkan pendekatan yang kedua dikatakan sebagai pendekatan yang menitikberatkan pada hasil-hasil material dan lebih menekankan pada sasaran. Secara umum pembangunan masyarakat (*community development*) adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara teratur dan bertahap, terencana dan diposisikan untuk memperbesar akses masyarakat agar terwujud kondisi sosial, ekonomi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitas kehidupan yang lebih indah apabila disandingkan dengan tahap kegiatan pembangunan setelah itu.⁷

Dimana dalam perkembangan desa atau suatu kelurahan maka keterlibatan beberapa organisasi masyarakat tokoh-tokoh adat, forum masyarakat dan pemerintahan harus saling bekerja sama dalam menjalankan visi dan misi pembangunan desa dan/atau kelurahan. Dalam Bab III pengelolaan pembangunan partisipatif bagian kesatu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Pasal 3:

1. Setiap orang baik individu maupun kelompok berkewajiban berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam hal:
 - a. Menyampaikan malah prioritas yang dihadapi dan dialami masyarakat untuk dikaji menjadi agenda prioritas pembangunan daerah.
 - b. Menyampaikan usul saran atu aspirasi untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah.
 - c. Terlibat secara aktif dalam proses pengembalian keputusan tentang rncana pembangunan daerah.
3. Penyampaian masalah dan usul saran sebagai mana dimaksud pada ayat 2 harus disertai dengan alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme penyaluran aspirasi publik melalui peroses musrenbang secara berjenjang.

⁷ Mohammad Ikbal Bahua, *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan melalui:

- a. Musyawarah antar kecamatan sosialisasi tingkat kabupaten.
- b. Musyawarah antar desa sosialisasi tingkat kecamatan.
- c. Musyawarah desa sosialisasi tingkat desa atau kelurahan.
- d. Forum penggalan gagasan tingkat dusun atau lingkungan.
- e. Musyawarah khusus perempuan tingkat desa atau kelurahan.
- f. Musrenbang perencanaan tingkat desa atau kelurahan.
- g. Musrenbang tingkat kecamatan.
- h. Musyawarah antar desa prioritas tingkat kecamatan.
- i. Forum SKPD tingkat kabupaten.
- j. Musyawarah antar kecamatan prioritas tingkat kabupaten.
- k. Musyawarah antar kecamatan penetapan tingkat kabupaten.
- l. Forum diskusi SKPD-DPRD / semiloka DPRD.
- m. Forum musrenbang kabupaten.

Dimana dalam suatu forum pertemuan tingkat dusun ini, yang disebut dengan forum penggalan gagasan yang bertugas untuk mengidentifikasi potensi dan masalah serta usulan-usulan aspiratif dari masyarakat tingkat dusun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata forum adalah wadah atau tempat pertemuan sebuah komunitas yang memiliki persamaan minat dan tujuan untuk bertukar pikiran suatu topik atau masalah secara bebas yang berkaitan dengan forum tersebut. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Pasal 1 ayat (9) disebutkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggalan gagasan yang selanjutnya disingkat PAGAS adalah suatu forum pertemuan ditingkat Dusun/lingkungan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah serta usulan-usulan aspiratif dari masyarakat tingkat Dusun/lingkungan di Desa/Kelurahan.

Forum penggalan gagasan ini terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif sedangkan nama dari forum penggalan gagasan ini yang terdapat di Desa Bandar Padang yaitu Forum Musyawarah Dusun (MusDus) yang kaitannya memang dari forum penggalan gagasan ini. Sangat banyak sekali manfaat yang di berikan forum-forum yang ada di desa dalam hal pengembangan dan pembangunan bersama salahsatunya yaitu forum musdus dan hanya ada pada suatu perdesaan. Akan tetapi, kenyataan dan observasi yang penulis lakukan di Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu bahwa tidak terlaksananya forum musdus. Dimana didalam perda sudah sangat jelas diatur mengenai forum penggalan gagasan tingkat dusun harus ada dan terbentuk.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 82 ayat (5) yaitu Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa. Partisipasi masyarakat sesuai dengan undang-undang diatas berupa forum musyawarah dusun sesuai dengan peraturan daerah.

Maka disini penulis tertarik ingin melakukan penelitian sosiologis dengan judul Pelaksanaan Forum Musyawarah Dusun Berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus Desa Bandar Padang).

Batasan Masalah

Agar penulis lebih terarah pada sasaran yang diinginkan dalam melakukan penelitian ini, maka penulis memfokuskan penelitian terhadap forum musyawarah dusun dalam pengelolaan pembangunan partisipatif di Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

C. Rumusan Masalah

Disini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Forum Musyawarah Dusun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus Desa Bandar Padang)?
2. Apa faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Forum Musyawarah Dusun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus Desa Bandar Padang)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Forum Musyawarah Dusun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus Desa Bandar Padang).

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Forum Musyawarah Dusun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus Desa Bandar Padang).

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mendalami pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara.
- c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi peneliti berikutnya untuk permasalahan yang sama.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁸ Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.⁹ Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer atau dasar yakni data yang diperoleh langsung yang dilakukan baik melalui Observasi (Pengamatan) maupun wawancara.

Sifat penelitian adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.¹⁰ Sifat dari penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan sifat-sifat dari fenomena sosial yang terjadi disekitar kita

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian, selain itu penulis menemukan kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaannya di lapangan bertolak belakang.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala Dusun, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), di Desa Bandar Padang Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah forum musyawarah dusun

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UII Press, Jakarta, 1982), h. 51.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2010), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat dusun di Desa Bandar Padang Tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif.

4. Populasi dan Sampel.

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi peneitian.¹¹ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau sifat yang sama. Populasi dalam Penelitian ini adalah, kepala Dusun, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) di Desa Bandar Padang Kabupaten Indragiri Hulu.

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat sampel dari populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹²

TABEL I.1
POPULASI DAN SAMPEL

Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
Kepala Dusun I Desa Bandar Padang	1 orang	1 orang	100%
Kepala Dusun II Desa Bandar Padang	1 orang	1 orang	100%

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014). h. 98.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rukun Warga (RW) di Desa Bandar Padang	4 orang	2 orang	50%
Rukun Tetangga (RT) di Desa Bandar Padang	10 Orang	5 Orang	50%

5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain :

- Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian¹³ baik dengan metode pengamatan (Observasi) ataupun wawancara (*Interview*) dengan Kepala Dusun I dan Dusun II, RW I dan III, RT I,II,III,VI dan VII Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.
- Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang menyangkut dengan penelitian, jurnal yang menyangku dengan penelitian, peraturan perundang-undangan dan lainnya. Data sekunder tersebut dibagi menjadi:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan menteri, peraturan daerah¹⁴. Bahan hukum primer ini dalam penelitian ini antara lain, Undang-Undang Nomor

¹³ *Ibid*, h. 30.

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan, dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang dapat berupa file-file yang berkaitan dengan penelitian disebuah instansi, rancangan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan berupa buku-buku yang mendukung terlaksananya penelitian ini merupakan data sekunder.¹⁵
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus.¹⁶

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

- a. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan Tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok

¹⁵*Ibid* h. 158

¹⁶*Ibid.*, h. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.¹⁷

Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan langsung kepada 2 kepala Dusun Desa Bandar Padang Kabupaten Indragiri Hulu dan 5 Rukun Tetangga (RT), 2 Rukun Warga (RW) di Desa Bandar Padang Kabupaten Indragiri Hulu.

c. Studi kepustakaan, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

d. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya.¹⁸ Penarikan kesimpulan digunakan metode deduktif yang mana cara penarikan kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.¹⁹

¹⁷ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Alfabet, Bandung, 2014), h.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 32.

¹⁹ Suratman dan Phillips Dillah, *Op. Cit*, h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Penulisan ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri. Akan tetapi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, dan memuat suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, selanjutnya akan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang gambaran umum Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB III: TINJAUAN TEORITIS

Bab ini memuat uraian teori-teori sebagai dasar hukum yang melandasi permasalahan meliputi pelaksanaan dan faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan forum musyawarah dusun di Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV:

Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian pelaksanaan forum musyawarah
dusun di Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida
Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif dan Faktor
penghambat pelaksanaan forum musyawarah dusun di Desa
Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri
Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan
Pembangunan Partisipatif.

BAB V:**PENUTUP**

Bab ini memuat uraian tentang kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah Desa Bandar Padang

Pada masa dahulu Desa Bandar Padang mulanya hanya berupa hutan belukar atau rimba namun berangsur angsur datanglah masyarakat dari Sungai Limau untuk membuka lahan perkebunan dan ladang berpindah – pindah setelah hutan ditebang, mereka berladang kemudian ditanam karet tetapi mereka tidak bermukim ditempat tersebut hanya menginap beberapa hari kemudian mereka pulang, kemudian datang lagi untuk menjenguk kebun mereka.

Setelah masa penjajahan Jepang berakhir barulah ada masyarakat yang bermukim di Bandar Padang nama Bandar Padang belum jelas asal usulnya dan siapa yang memberi nama Bandar Padang tersebut, ada sebagian masyarakat yang mengatakan adanya padang ilalang yang tumbuh, dan ada pula yang memberi makna tersendiri bahwa padang rumput ilalang yang luas.

Pada tahun 1950 an masyarakat mulai bertambah dan bermukin di Bandar Padang yaitu daerah Lubuk Kepayang disitu awal mulanya kampung Desa Bandar Padang. Bandar Padang terdiri dari Lima Rimbo yaitu Rimbo Penagukan, Rimbo Payo diloa, Rimbo Telago Indah, Rimbo Kulim Besisek, dan Rimbo Ncilak.

Terbentuknya Desa Bandar Padang berasal dari satuan adat suku melayu yang ada di wilayah kerajaan Kabupaten Indragiri Hulu yang di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pimpin oleh Raja Indragiri. Dibawah Raja indragiri adanya Patih dibawah Patih ada Kepala Suku. Kebatinan yang dibagi – bagi oleh seorang Patih yang berkedudukan di Sungai Limau. Sepuluh Batin yang tinggal di Batang Gansal. Sepuluh Batin di Batang Cenaku, satu Batin di Anak Talang. Batang Cenaku di bentuk oleh Patih Tiga Kepala Suku.

Kepala Suku Pertama adalah muko – muko berkedudukan di Pangkalan Kasai dibawah muko – muko dibentuklah Batin. 1. Batin Pangkalan Kasai, 2. Batin Beligan sebagai tangan kanan batin Pangkalan Kasai, 3. Batin Pejangki sebagi tangan kiri Batin Pangkalan Kasai. Kebesaran muko – muko adalah Lambing Canggah.

Kepala Suku Kedua adalah Pembubung yang berkedudukan di Aur Cina, Pembubung sama dengan Batin atau Penghulu (kepala Desa).

Kepala Suku Ketiga adalah Pemuncak yang berkedudukan di Anak Talang sebagi Hulu Balang Muko- Muko dan Pembubung. Kebesarn pemuncak adalah Keris, dibawah Pemuncak dibentuk lagi Batin atau Penghulu.

Terbentuknya Desa Bandar Padang adalah Pemekaran dari desa beligan pada tanggal 14 Februari 2007 yang diresmikan oleh Raja Muda Indragiri dan sebagai Bupati Inhu dikala itu yaitu Bapak Drs. Tamsir Rahman. MM. Pemekaran mulai di cetuskan sejak tahun 1999 dan diadakanlah rapat tokoh masyarakat adat, agama dan Pemuka Masyarakat serta Pemuda dikala itu masa Pelaksanaan sampai Pemekaran Tenggara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu selama delapan tahun dengan tim penyusun pelaksanaan pemekaran ditahun 1999 adalah; Arpan (Kades), Anuar, Hasan Basri, Hardisam, Herman, Rustami, Supirmanto, Darmawi, Hermansyah, Bagung, M jusuf, Amri, Subirman, Tamrin, Usman, Adris, M isya, M Darwis, M Hata, Nasarudin, Tarmin, Samsir, Agus Salim, Mungih, Lubit dkk.

Selain itu berjalan terus, Maka Pemerintahan Desa Beligan di Pimpin Oleh Pjs. Drs Abdul Hayat bersama tokoh lain pada tahun 2007.

Barulah pembentukan penyusunan administrasi, persyaratan pemekaran selesai di susun, dan diakui oleh DPRD Kab Inhu dan ditembuskan ke Gubernur Riau serta ke Kemendagri, Maka dilantiklah Pjs kepala Desa pada saat itu, pada tanggal 14 Februari 2007, atas Nama HERMAN, maka dengan itu Desa Bandar Padang sah menjadi Desa Definitif sampai saat ini.

Karena Desa Bandar Padang dilintasi jalan Lintas Selatan yang menghubungkan Kecamatan Seberida Dengan Kecamatan Batang Cenaku, perkembangan kampung Bandar Padang secara berangsur angsur bertambah pesat dan masyarakat bertambah banyak yang pindah ke Bandar Padang, sehingga Bandar Padang berpenduduk beraneka ragam.²⁰

Adapun pejabat Kepala Desa Bandar Padang mulai Bandar Padang berdiri sampai sekarang sebagai berikut :

1. Tahun 2007-2008 HERMAN sebagai Pjs. Kepala Desa dan YUSDI

²⁰ Profil Desa Bandar Padang.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SAYUTI sebagai Sekretaris Desa.

2. Tahun 2008-2011 HERMAN sebagai Kepala Desa dan YUSDI SAYUTI sebagai Sekretaris Desa.
3. Tahun 2011-2014 HERMAN sebagai Kepala Desa dan SARIDANA sebagai Sekretaris Desa.
4. Tahun 2014-2015 FITRI LISON, S.PKP sebagai Pjs Kepala Desa dan ANITA SUSANTI sebagai Sekretaris Desa.
5. Tahun 2015-2021 HERMAN sebagai Kepala Desa dan DARLIUS ARHAM, SP sebagai Sekretaris Desa.

B. Demografi

a. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Bandar Padang, terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Pangkalan Kasai dan Pejangki

Sebelah selatan : Desa Talang Suka Maju

Sebelah Timur : Desa Pangkalan Kasai

Sebelah Barat : Desa Beligan

b. Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman : 500 Ha
2. Plasma PT. MNIS : 415 Ha
3. Plasma PT. SML : 566 Ha
4. Koperasi Mandian Jaya : 263 Ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ladang/tegalan : 772 Ha
6. Hutan Karet Tua : 1.600 Ha
7. Perkantoran : 1 Ha
8. Sekolah : 2 Ha
9. Jalan : 20 Ha
10. Lapangan sepak bola : 1.5 Ha

c. Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 16 km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 30 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 42 km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 60 Menit

d. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga : 630 KK
2. Laki-laki : 1.498 Jiwa
3. Perempuan : 1.225 Jiwa
4. Jumlah : 2.723 Jiwa

Keadaan Sosial

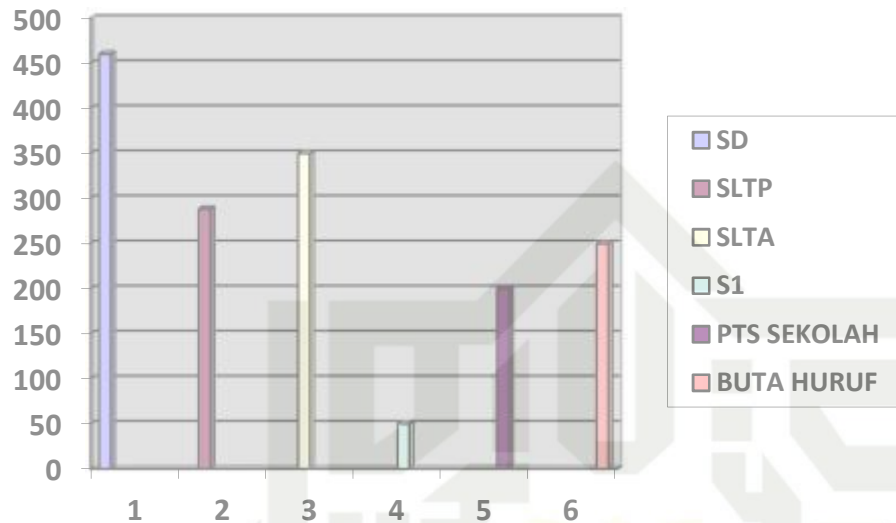
a) Pendidikan

1. SD/ MI : 460 Orang
2. SLTP/ MTs : 288 Orang
3. SLTA/ MA : 350 Orang
4. S1/ Diploma : 50 Orang
5. Putus Sekolah : 200 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Buta Huruf : 250 Orang



b) Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK : 1 buah/ Lokasi di Dusun II
2. PAUD : 2 buah/ Lokasi di Dusun I dan Dusun II
3. SD : 1 buah/ Lokasi di Dusun I
4. PDTA : 1 buah/ Lokasi di Dusun I
5. TPQ : 2 buah/ Lokasi di Dusun II

c) Kesehatan

1. Kematian Bayi
 - a) Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 11 orang
 - b) Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 1 orang
2. Kematian Ibu Melahirkan
 - a) Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 11 orang
 - b) Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Cakupan Imunisasi

- Cakupan Imunisasi Polio 3 : 105 orang
- Cakupan Imunisasi DPT-1 : 95 orang

4. Cakupan Imunisasi Cacar :orang

5. Gizi Balita

- Jumlah Balita : 467 orang
- Balita gizi buruk :orang
- Balita gizi baik : 467 orang
- Balita gizi kurang :orang

6. Pemenuhan air bersih

- Pengguna sumur galian : 445 KK
- Pengguna air PAH : 0.... KK
- Pengguna sumur Bor : 150 KK
- Pengguna sumur hidran umum : 200 KK
- Pengguna air sungai : 50 KK

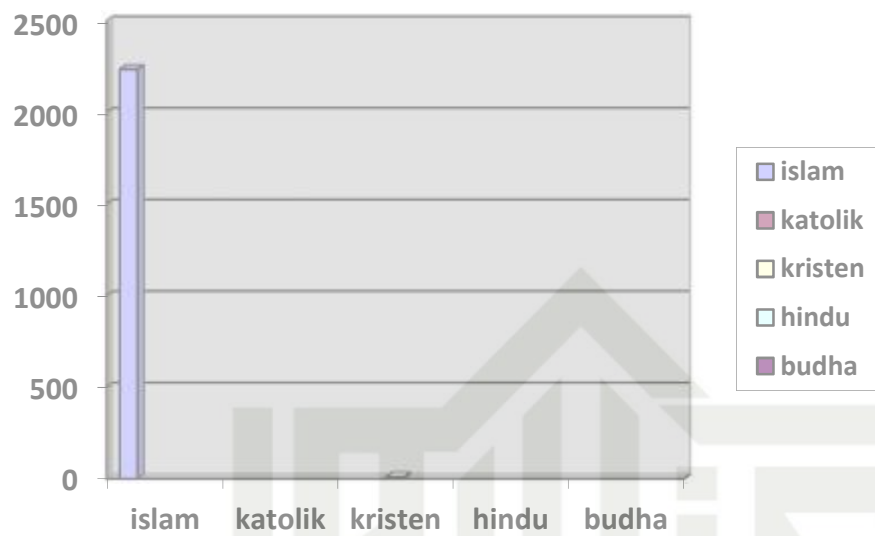
d) Keagamaan.

Data Keagamaan Desa Bandar Padang Tahun 2015 Jumlah Pemeluk :

- Islam : 2235 orang
- Katolik : 0 orang
- Kristen : 10 orang
- Hindu : 0 orang
- Budha : 0 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



e) Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid : 3 buah
- Musholla : 9 Buah
- Gereja : 0 buah
- Pura : 0 buah
- Vihara : 0 buah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi Ekonomi

a) Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah	: 0	ha
2. Padi Ladang	: 0	ha
3. Jagung	: 2	ha
4. Palawija	: 5	ha
5. Tembakau	: 0	ha
6. Tebu	: 1	ha
7. Kakao/ Coklat	: 5	ha
8. Sawit	: 1551	ha
9. Karet	: 1450	ha
10. Kelapa	: 2	ha
11. Kopi	: 0	ha
12. Singkong	: 1	ha
13. Lain-lain	: 4	ha

b) Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing	: 200	ekor
2. Sapi	: 150	ekor
3. Kerbau	: 0	ekor
4. Ayam	: 50000	ekor

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Itik : 100 ekor
6. Burung : 50 ekor
7. Lain-lain : ekor

c) Perikanan

1. Kolam Ikan : 10 ha
2. Tambak udang :ha
3. Lain-lain :ha

d) Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1. Petani : 500 orang
2. Pedagang : 50 orang
3. PNS : 6 orang
4. Tukang : 20 orang
5. Guru : 50 orang
6. Bidan/ Perawat : 5 orang
7. TNI/ Polri : 1 orang
8. Pesiunan : orang
9. Sopir/ Angkutan : 20 orang
10. Buruh : 50 orang
11. Jasa persewaan : 0 orang
12. Swasta : 385 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi Pemerintahan Desa

a) Pembagian Wilayah Desa

Desa Bandar Padang terbagi ke dalam 2 Dusun terdiri dari :

1. Dusun I : Jumlah 2 RW dan 5 RT
2. Dusun II : Jumlah 2 RW dan 5 RT

b) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

1. Lembaga Pemerintah Desa

Jumlah Aparatur Desa :

- a. Kepala Desa : 1 Orang
- b. Sekretaris Desa : 1 Orang
- c. Perangkat Desa : 7 Orang

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 7 Orang

3. Lembaga kemasyarakatan

- a. LPM : 1
- b. PKK : 1
- c. Posyandu : 2
- d. Pengajian : 3 Kelompok
- e. Arisan : 3 Kelompok
- f. Simpan Pinjam : 5 Kelompok
- g. Kelompok Tani : 10 Kelompok
- h. Gapoktan : 1 Kelompok



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | | |
|------------------|-----|----------|
| i. Karang Taruna | : 1 | Kelompok |
| j. Risma | : 0 | Kelompok |
| k. Ormas/LSM | : 0 | Kelompok |
| l. Lain-lain | : 1 | Kelompok |

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
BANDAR PADANG KECAMATAN SEBERIDA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**TABEL II.1
NAMA APARAT DESA BANDAR PADANG**

NAMA-NAMA APARAT DESA BANDAR PADANG TAHUN 2016		
1	Kepala desa	HERMAN
2	Sekretaris Desa	DARLIUS ARHAM, SP
3	Kepala Seksi Pemerintahan	LENDRA SARIADI, S.Sos
4	Kepala Seksi Kesejahteraan & Pelayanan	SANDI IRAWAN, S.Pd.I
5	Kepala Urusan Keuangan & Perencanaan	ETI SUMARNI
6	Kepala Urusan Tata Usaha	DESMIATI, SE.SY
7	Tukang Kebun / Kebersihan	LUKMAN
8	Penjaga Kantor Desa	MASTUR
9	Kepala Dusun I	ZAINIR
10	Kepala Dusun II	ANDRI TAUFIK

Sumber: Profil Desa Bandar Padang 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

BANDAR PADANG KECAMATAN SEBERIDA

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TABEL II.2

NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)		
1	Ketua	JUMANTO
2	Wakil Ketua	ABDUL MURSID YANTO
3	Sekretaris	ISKANDAR
4	Anggota I	EVIS ADRI
	Anggota II	HARTONI
	Anggota III	ATAN AHMAD
	Anggota IV	DEDI EFENDI

Sumber: Profil Desa Bandar Padang 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

Teori Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Menurut W.S Sayre Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.²¹

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan tugas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.²²

Sedangkan yang dikatakan Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah

²¹ Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010),

²² Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah lainnya sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.²³

C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.²⁴

pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai :

- a. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (*tugas medebewind*). Tugas ini adalah untuk turutserta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya;
- b. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak

²³ Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁴ Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung: Nusamedia, 2012), h. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.²⁵

2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Merunut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kewenangan mengandung arti :

- (1) Hal wewenang
- (2) Hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.

Sedangkan kata wewenang mengandung arti :

- (1) Hak dan kekuasaan untuk bertindak
- (2) Kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.²⁶

²⁵ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), h. 77.

²⁶ Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Nuansa, 2012), h. 143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.²⁷

Dalam Undang-Undang Nomor diakatan bahwa pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu:²⁸

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Kewenangan daerah mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan,

²⁷ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Jakarta: Liberty, 1997), h. 154.

²⁸ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan dibidang lainnya yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara macro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional. Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.²⁹

B. Teori Demokrasi

1. Dasar Teori Demokrasi Versi Hans Kelsen

Mengutip teori Jean Jaques Rousseau, demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Pernyataan Rousseau ini seakan mengatakan, bahwa demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna. Padahal disadari oleh Rousseau, bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia. Oleh karenanya, yang menjadi ukuran ada tidaknya sebuah demokrasi dalam sebuah negara bukan ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan lebih melihat pada fakta tahapan yang ada. Demokrasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya sebuah negara.

²⁹ C.S.T Kansil, Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan begitu Rousseau seolah ingin mengatakan bahwa jika menempatkan demokrasi secara kaku dan ideal, tidak akan pernah ada demokrasi yang nyata dan tidak akan pernah ada demokrasi.³⁰

Hal inilah yang juga disadari oleh Hans Kelsen. Uraian tentang demokrasi menjadi lebih tertata dan terstruktur. Ini untuk membuktikan, bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan menuju kesempurnaan. Awal dari datangnya ide demokrasi menurut Hans Kelsen adalah adanya ide kebebasan yang berada dalam benak manusia. Pertama kali, kosakata “kebebasan” dinilai sebagai sesuatu yang negatif. Pengertian “kebebasan” semula dianggap bebas dari ikatan-ikatan atau ketiadaan terhadap segala ikatan, ketiadaan terhadap segala kewajiban. Namun, hal inilah yang ditolak oleh Hans Kelsen. Pasalnya, ketika manusia berada dalam konstruksi kemasyarakatan, maka ide “kebebasan” tidak bisa lagi dinilai secara sederhana, tidak lagi semata-mata bebas dari ikatan, namun ide “kebebasan” dianalogikan menjadi prinsip penentuan kehendak sendiri. Inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran Hans Kelsen mengenai demokrasi.³¹

Pendapat Hans Kelsen mengenai ide “kebebasan” dalam konteks kehidupan bermasyarakat ini sejalan dengan pemikiran cendekiawan muslim, Abu Nashar bin Mohammad bin Mohammad bin Tharkam bin

³⁰ Ini adalah kesimpulan penulis berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2007, h. 113.

³¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan pertama, Penerbit Nusa dan penerbit Nusamedia, Bandung, 2006, h. 404.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unzalagh, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Farabi. Bagi Farabi, kehidupan manusia tidak bisa lepas dari masyarakat karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial. Hakekat ini merupakan sebuah kecenderungan yang alami. Adapun kecenderungan untuk hidup bermasyarakat tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi juga menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak saja secara material, namun juga spiritual. Salah satu kelengkapan hidup adalah timbulnya bermacam pemikiran atau ide. Ini bisa diartikan bahwa ide kebebasan dalam versi Farabi merupakan sebuah kecenderungan alami, dengan tujuan kebahagiaan hidup.³²

Dalam masyarakat, sudah barang tentu akan terbentuk pemilahan pemilahan ide atau kehendak. Berbagai pendapat mengenai sebuah persoalan akan muncul secara acak. Dari titik inilah munculnya pola kepentingan yang berujung pada adanya suara mayoritas dan suara minoritas, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Dalam pandangan Hans Kelsen, suara mayoritas tidak melahirkan dominasi absolut atau dengan kata lain, dalam bahasa Hans Kelsen, adalah kediktatoran mayoritas atas minoritas. Prinsip mayoritas dalam masyarakat demokratis, hanya dapat dijalankan jika segenap warga masyarakat dalam sebuah negara

³² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Edisi Kelima, UI Press, Jakarta, 1993, h. 51. Lebih lanjut Farabi mengemukakan bahwa terbentuknya sebuah masyarakat akan sangat berbeda antara satu sama lain. Perbedaan itu akan sangat bergantung kepada faktor iklim dan lingkungan tempat tinggal dimana masyarakat tersebut tinggal. Faktor kewilayahan inilah yang kemudian membentuk watak, pola pikir, perilaku, orientasi atau kecenderungan dan adat kebiasaan, termasuk di dalamnya adalah pemikiran. Dalam konteks ini, bisa dipahami bahwa Farabi juga memiliki pemahaman yang sama terhadap tahapan atau proses kehidupan manusia, termasuk pola pikir, yang pada nantinya akan membentuk wacana tentang masyarakat, pemerintahan dan demokrasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbolehkan turut serta dalam pembentukan tatanan hukum. Inilah yang kemudian melahirkan istilah kompromi.³³

2. Demokrasi dan Kompromi Dalam Pemikiran Hans Kelsen

Bertemunya suara mayoritas dan suara minoritas tentunya menghasilkan kompromi. Menurut Hans Kelsen, salah satu esensi demokrasi terletak pada ada tidaknya sebuah kompromi yang menyatukan perbedaan pendapat untuk menentukan sebuah tatanan bagi landasan sebuah negara. Prinsip kompromi adalah penyelesaian sebuah masalah (konflik) melalui suatu norma yang tidak seluruhnya sesuai dengan kepentingan-kepentingan dari salah satu pihak, tidak juga seluruhnya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pihak lain.³⁴

Dengan adanya kecenderungan seperti itu, demokrasi merupakan suatu pendekatan ke arah cita-cita penentuan kehendak sendiri secara sempurna. Sejalan dengan hal tersebut, pembahasan yang terjadi di antara mayoritas dan minoritas terus menerus dilakukan agar terjadi sebuah kesepakatan bersama dan menjadi pegangan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatannya.

Pembahasan sebuah masalah tidak terbatas dalam parlemen semata, tetapi sebagian besar juga terjadi di lembaga-lembaga politik, di dalam surat kabar, buku, dan sarana-sarana pendapat umum yang lain. Sebuah negara berciri demokrasi mempunyai sarana-sarana yang luas terhadap keberadaan

³³ Hans Kelsen, *Op.Cit*, h. 407.

³⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat umum. Menurut Hans Kelsen, pendapat umum hanya dapat muncul jika kebebasan intelektual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan beragama dijamin.³⁵

Jaminan kebebasan beragama dalam kehidupan bernegara tidak hanya dijamin keberlangsungannya, tetapi di jaga dan dipupuk agar berdampingan dengan agama yang menjadi mayoritas pada sebuah negara. Selain diakui oleh Hans Kelsen, pengakuan terhadap kebebasan beragama juga dijamin oleh pemikir Islam lainnya, yaitu Abdul Qodir Jaelani. Masalah agama dan keyakinan tidak boleh berada dalam ruang lingkup pemaksaan, baik pemaksaan yang timbul dari daya tarik ekonomi atau bahkan daya tarik seks. Untuk menentukan pilihan dalam konteks agama dan keyakinan, sepenuhnya diserahkan kepada individu yang bersangkutan.³⁶

Dari semua yang ditawarkan oleh Hans Kelsen, bahwa kompromi menjadi sebuah syarat utama dalam penentuan apakah sebuah negara menganut prinsip demokrasi ataukah tidak sama sekali. Tentu saja, dalam prinsip demokrasi sangat bergantung pada budaya, dan adat istiadat setempat. Hal itu disadari betul oleh Hans Kelsen, oleh karenanya ia menuturkan bahwa prinsip demokrasi sebuah negara tidak bisa dijadikan patokan bagi negara lain. Tergantung pada banyak aspek dan keberadaan lingkungan yang melingkupinya. Dewasa ini, banyak sekali varian demokrasi yang terjadi pada sebuah negara. Varian ini menyimpulkan,

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Abdul Qodir Jaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Karya Baru Press, Surabaya, 1995, h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa keberadaan budaya demokrasi tidak terjadi begitu saja, namun melalui proses. Proses awalnya, dalam konsepsi Hans Kelsen, adalah adanya kompromi yang sehat yang terjadi di antara kehendak mayoritas dan kehendak minoritas. Hal tersebut tidak hanya terbentuk pada parlemen semata, tetapi juga melembaga dalam kehidupan politik yang lain.

Ada sebuah pegangan dalam memahami sikap Hans Kelsen mengenai negara dengan bercirikan prinsip demokrasi. Di antaranya adalah:

1. Adanya kehendak mayoritas dan kehendak minoritas
2. Kehendak mayoritas tidak bisa menjadi dominasi absolut
3. Adanya kompromi di antara kehendak mayoritas dengan kehendak minoritas dalam menyikapi sebuah permasalahan dan dalam pembentukan sebuah tatatan.
4. Tidak ada pemaksaan dalam beragama dan berkeyakinan
5. Terdapat kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan pendapat untuk mengemukakan pendapat dijamin keberadaannya, baik melalui konstitusi ataupun melalui kesepakatan adat yang terjadi di sebuah negara.
6. Kompromi yang sehat menjadikan tidak diketemukannya perbenturan kepentingan antara kehendak mayoritas dan kehendak minoritas yang akan biasanya akan berbuah pada anarki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Prinsip Keterwakilan Masyarakat Dalam Lembaga Politik

Tipe demokrasi yang ideal diwujudkan dalam derajat yang berbedabeda. Melalui konstitusi yang berbeda-beda pula. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang mempunyai derajat paling tinggi. Demokrasi langsung dapat ditandai dengan fakta, bahwa pembuat peraturan, dan juga fungsi eksekutif dan fungsi legislatif, dilakukan oleh masyarakat di dalam pertemuan akbar atau sebuah pertemuan umum. Pelaksanaan semacam ini hanya mungkin terjadi di dalam masyarakat-masyarakat kecil dan di bawah kondisi-kondisi sosial yang sederhana. Oleh karenanya, dalam pendapat Hans Kelsen dan sebagian besar pemikir politik dan ketatanegaraan lainnya, demokrasi langsung semacam ini tidak lagi mendapatkan tempat dalam konsep demokrasi modern yang saat ini sedang diwacanakan oleh banyak pemerintahan di dunia.

Hal yang paling mungkin terjadi adalah suatu demokrasi dimana fungsi legislatif dijalankan oleh parlemen yang dipilih oleh rakyat, dan fungsi eksekutif dan yudikatif juga dijalankan melalui pemilihan umum yang dijamin keabsahannya. Pada kondisi ini, Hans Kelsen menyatakan pendapatnya bahwa suatu pemerintahan adalah sebuah “perwakilan” karena sepanjang pejabat-pejabatnya dipilih oleh rakyat, maka pejabat tersebut bertanggungjawab penuh terhadap pemilihnya. Jika kemudian pemerintahan

tidak bisa bertanggungjawab penuh terhadap pemilihnya, maka hal ini tidak bisa disebut sebagai “perwakilan yang sesungguhnya”.³⁷

Dalam demokrasi modern, secara mencengangkan, Hans Kelsen berpendapat bahwa apa yang terjadi dewasa ini di negara-negara yang mengatasnamakan negara demokrasi, ternyata tidak sepenuhnya memahami proses keterwakilan ini. Prinsip keterwakilan yang dipahami oleh Hans Kelsen ternyata berorientasi pada ada tidaknya proses pertanggungjawabannya terhadap pemilih. Ini artinya, demokrasi dalam konteks perwakilan mengharuskan adanya pertanggungjawaban yang besar, terutama secara moral, kepada para pemilihnya, dan bukan pertanggungjawaban terhadap partai politik yang mengusungnya.

Secara umum, pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Hans Kelsen banyak sekali berdasar pada filsafat Plato dan Aristoteles dan juga beberapa pemikir lain yang hidup pada zaman Yunani kuno. Ada beberapa alasan mengapa bangsa Yunani bisa memberikan kontribusi pemikiran terhadap beberapa teori hukum yang fundamental terhadap perkembangan hukum ke depan. Kecenderungan-kecenderungan untuk berpikir spekulatif serta persepsi intelektualnya untuk menyadari adanya kehidupan manusia dan konflik-konflik dalam kehidupan dunia ini, seperti terlihat dalam karya-karya filsafat dan kesusasteraannya.³⁸

³⁷ Hans Kelsen, *Op.Cit.* h. 409.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan ke lima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkembangan Polis (negara kota pada masa bangsa Yunani), membuat bangsa Yunani lebih tajam dalam memandang persoalan hukum. Banyaknya kekacauan, konflik-konflik, pergantian pemerintahan yang begitu sering terjadi, serta masa-masa tirani, membuat bangsa Yunani dapat memberikan bahan yang banyak sekali bagi pemikiran hukum yang sifatnya spekulatif mengenai persoalan hukum dan masyarakat. Secara fundamental, hal tersebut membuat banyak sekali sumbangsih bangsa Yunani terhadap perkembangan hukum, terutama yang berhubungan dengan masyarakat atau publik.

Harus diakui bahwa pemikiran Plato dan Aristoteles menjadi bahan referensi bagi dunia perkembangan hukum. Plato memberikan sumbangan pemikiran dalam dua bukunya yang begitu fenomenal, masing-masing *The Republic* dan *The Laws*. Dalam *The Republic*, Plato memberikan sebuah solusi atas pertentangan-pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat. Penyelesaian atau solusinya berada pada kaum cendekiawan yang mengerti hukum, yang oleh Plato disebut sebagai hakim.

Pada buku *The Laws*, Plato kemudian memberikan sebuah jawaban terhadap permasalahan hukum yang sebelumnya ada pada buku *The Republic*. Konsep “negara hukum” menjadi sebuah pertimbangan dalam menyatukan visi dan misi masyarakat terhadap persoalan hukum. Dalam karyanya ini, Plato tidak lagi memberikan konsep negara yang hanya diperintah oleh kekuasaan serta orang-orang yang bebas. Keadilan harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijalankan melalui “norma-norma yang tertulis”. Negara harus dijalankan oleh penguasa negara yang tidak membedakan orang atau masyarakat.

Pemikiran Plato ini kemudian disempurnakan oleh sang murid, yaitu Aristoteles. Aristoteles melakukan perbedaan yang esensial terhadap konsep hukum tentang apa yang dinamakan sebagai keadilan distributif dan keadilan korektif. Bagi Aristoteles, keadilan distributif adalah konsep keadilan menyangkut soal pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya di masyarakat. Ia juga sepakat dengan Plato, bahwa kedudukan semua orang di muka hukum adalah sama dan seimbang.

Sedangkan keadilan korektif, menurut Aristoteles, dalam menjalankan hukum, harus ada standar tunggal dan sama yang sifatnya umum, sebagai sebuah konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan orang lain di sekitarnya. Standar tersebut harus seimbang dan diterapkan tanpa melihat orang. Standar yang digunakan juga harus obyektif.

Keberadaan hukum merupakan sebuah prasyarat demi adanya keteraturan kehidupan dalam bermasyarakat. Dalam perkembangannya, hukum tidak hanya mengatur tingkah laku yang sudah ada dalam masyarakat dan mempertahankan kebiasaan yang telah ada. Lebih dari itu semua, hukum telah mengarah pada suatu alat atau sarana. Selain itu pendapat yang mengatakan bahwa hukum merupakan sebuah ekspresi atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehendak yang terwujud dalam masyarakat, juga dapat dipergunakan sebagai definisi hukum.

Teori Pembangunan Partisipatif

1. Pembangunan

pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan system ekonomi dan social. Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen ekonomi maupun non ekonomi.³⁹

Pembangunan berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat setempat, selain itu juga resiko atau cost yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan ini akan ditanggung juga oleh masyarakat setempat. Dengan demikian tidak hanya benefit yang harus diketahui semenjak program pembangunan ini direncanakan tetapi juga cost-nya.

pembangunan adalah sebuah kegiatan yang kolosal, memakan waktu panjang, melibatkan seluruh warganegara dan dunia internasional, dan menyerap hampir seluruh sumber daya Negara bangsa. Oleh karena itu, sudah seharusnya jika pembangunan di-management. Kata Nugroho, perencanaan pembangunan menjadi kunci karena sesungguhnya ini adalah

³⁹ Michael P. Tadoro, *Pembangunan Ekonomi*, Bumi Aksara, Makassar, 2000, h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan yang maha rumit. Seperti diketahui, istilah “pembangunan” adalah istilah khas dari proses rekayasa social (dalam arti luas, termasuk ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya) yang dilaksanakan oleh Negara-negara berkembang.⁴⁰

Pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Perencanaan pembangunan merupakan perencanaan yang bertujuan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang tersedia dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat secara menyeluruh.⁴¹

2. Pembangunan Partisipatif

Partisipasi adalah proses pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapinya. Pengertian partisipasi adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Dengan demikian, pengertian partisipatif adalah pengambilan bagian/pengikutsertaan atau masyarakat terlibat langsung dalam setiap tahapan proses pembangunan

⁴⁰ Riant Nugroho D., *Reinventing Pembangunan Menata Ulang Paradigma Pembangunan untuk Membangun Indonesia Baru dengan Keunggulan Global*, Elex Media Komputindo, Tangerang Selatan, 2003, h. 67-68.

⁴¹ Mudrajat Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta, 2004, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulai dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) sampai pada monitoring dan evaluasi (controlling).

Berbagai bentuk partisipasi masyarakat di dalam perencanaan program pembangunan dapat dibentuk atau diciptakan. Hal ini sangat tergantung pada kondisi masyarakat setempat, baik kondisi sosial, budaya, ekonomi maupun tingkat pendidikannya. Di beberapa daerah bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah terjadi, di mana wadah serta mekanisme partisipasinya telah terbentuk dengan baik.

Terdapat beberapa langkah dalam mengajak peran serta masyarakat secara penuh di dalam pembangunan dapat dilakukan dengan jalan :

1. Merumuskan dan menampung keinginan masyarakat yang diwujudkan melalui upaya pembangunan.
2. Dengan dibantu oleh pendamping atau nara sumber atau lembaga advokasi masyarakat, dibuatkan alternatif perumusan dari berbagai keinginan tersebut.
3. Merancang pertemuan seluruh masyarakat yang berminat dan berkepentingan, yang membicarakan cost dan benefit dari pelaksanaan pembangunan ini.
4. Memilih tokoh masyarakat atau perwakilan masyarakat untuk turut serta dalam proses selanjutnya.
5. Proses pelaksanaan pembangunan dan pembiayaan pembangunan serta rencana pelaksanaan pembangunan dilangsungkan beberapa kali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan melibatkan seluruh instansi maupun pelaku pembangunan yang terkait, di samping tokoh atau wakil masyarakat dan DPRD.

6. Mendapatkan sejumlah usulan program pembangunan yang sudah disepakati.
7. Melaksanakan program pembangunan, disertai dengan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan.⁴²



UIN SUSKA RIAU

⁴² Riyadi Supriyadi Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, h. 321.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu “Pelaksanaan Forum Musyawarah Dusun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus Desa Bandar Padang)” adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan dilapangan penulis mengambil kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus Desa Bandar Padang) belum efektif dan banyak kendala dalam mensosialisasikannya dan pelaksanaannya dilapangan yang masih harus diperbaiki.

1. Pelaksanaan forum musyawarah dusun atau sering dikenal dengan sebutan forum Musdus yaitu suatu forum dimana Masyarakat ikut andil dalam perencanaan pembangunan desa. Forum ini dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun yang beranggotakan RT dan RW. Forum ini memiliki 2 Forum disetiap dusun yaitu forum musdus 1 dan forum musdus 2. Tujuan daripada Musdus yaitu mengidentifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan dusun, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup bidang sosial-budaya, ekonomi produktif warga, dan sarana prasarana fisik lingkungan, berikut alternatif solusi atau pemecahan masalahnya. Jadi aspirasi warga dusun bisa di serap dan diajukan kepada BPD dan Pemerintah Desa kemudian menetapkan usulan kegiatan prioritas pembangunan yang akan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan Forum Musrenbang Desa.

2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan forum musyawarah dusun yakni kurangnya sosialisasi peraturan tersebut dari pihak desa maupun pihak yang bersangkutan yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak paham tentang pentingnya forum musdus ini bahkan ada masyarakat yang tidak tahu menahu tentang forum musdus ini. Tempat pelaksanaan forum ini yang terbilang tidak menentu yang membuat banyaknya anggota dari forum musdus ini malas untuk menghadiri kegiatan tahunan ini. Serta anggaran yang tidak pasti untuk melaksanakan forum juga hal penting yang terkadang gagalnya dilaksanakan forum musdus ini. Sebaiknya hal-hal yang menyebabkan forum ini gagal dilaksanakan harus di perbaiki oleh pihak terkait agar pelaksanaannya berjalan dengan semestinya.

Saran

1. Pemerintah daerah ataupun pihak yang bersangkutan berkewajiban mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif karna dalam hal ini agar masyarakat terkusus masyarakat desa dapat mengerti pentingnya

peraturan tersebut untuk masyarakat yang ada didesa, jadi masyarakat akan aktif dalam perencanaan pembangunan.

2. Forum musdus seharusnya memiliki tempat yang sesuai dengan keadaan masyarakat agar dalam pelaksanaan forum ini berjalan sesuai dengan mestinya.
3. Dalam foun musdus ini seharusnya dianggarkan kejelasan dana dalam pelaksanaannya agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Miruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- HAW Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Michael P. Tadoro. 2000. *Pembangunan Ekonomi*. Makassar: Bumi Aksara.
- Mohammad Ikbal Bahua. 2018. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Gorontalo : Ideas Publishing.
- Mudrajad Kuncoro. 2014. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nimas Latifah Letty Aziz dan R. Siti Zuhro. 2018. *Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Bogor Indonesia.
- Pamin Napitupulu. 2012. *Menakar Urgensi Otonomi Daerah*. Bandung: PT. Alumni.
- Riant Nugroho D.. 2003. *Reinventing Pembangunan Menata Ulang Paradigma Pembangunan untuk Membangun Indonesia Baru dengan Keunggulan Global*. Tangerang Selatan: Elex Media Komputindo.
- Ryadi Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soerjono Soekanto. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UII Press, 1982.
- Soejiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suprawoto. 2018. *Government Public Relations Perkembangan Dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Sumatman dan Phillips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabet.
- Zahnuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undang

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif.

DOKUMENTASI SELAMA PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Kepala Dusun Desa bandar padang



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan RT dan RW setempat di Desa Bandar Padang



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR WAWANCARA DENGAN KEPALA DUSUN DESA BANDAR
PADANG**

1. Apakah ada pelaksanaan forum musyawarah dusun di Desa Bandar Padang?
2. Apakah sudah ada sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif?
3. Pentingkah pelaksanaan forum musyawarah dusun ini bagi Desa Bandar Padang?
4. Siapakah anggota-anggota dari forum musyawarah dusun ini?
5. Bagaimana pelaksanaan forum musyawarah dusun ini?



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR WAWANCARA DENGAN RT DAN RW DESA BANDAR
PADANG**

1. Dimana tempat diadakannya forum musyawarah dusun ini?
2. Apakah sudah ada sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif?
3. Kapan forum musyawarah dusun ini dilaksanakan?
4. Apakah dengan adanya forum musyawarah dusun ini berdampak positif terhadap masyarakat?
5. Bagaimana pelaksanaan forum musyawarah dusun ini?



UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Kepala Badan Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Erni, S.Sos. MM
NIP. 19680226 199103 2 002

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul PELAKSANAAN FORUM MUSYAWARAH DUSUN
BERBASIS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KECAMATAN SEBERDA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU (Studi kasus Desa Bandar Padang), ditulis oleh saudara :

Nama : MUHAMMAD ADNAN
NIM : 11527103078
Program Studi : Ilmu Hukum
Deminarkan pada :
Hari / Tanggal : Kamis / 17 Oktober 2019
Narasumber : Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Oktober 2019

Narasumber

UIN SUSKA RIAU

Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH
NIP. 19590711 199503 2 001



1. Diarng mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarng mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/9954/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ADNAN
N I M : 11527103078
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 13 NOVEMBER 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 20 Desember 2019
Dekan,

UIN SUSKA RIAU



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP 195807121986031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MUHAMMAD ADNAN
NIM	: 11527103078
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:PELAKSANAAN FORUM MUSYAWARAH DUSUN BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN
INDRAGIRI HULU (Studi Kasus Desa Bandar Padang)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 11005

Tersubsan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29151
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10054/2019 Tanggal 26 Desember 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama	: MUHAMMAD ADNAN
NIM / KIP	: 11527103078
Program Studi	: ILMU HUKUM
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: PELAKSANAAN FORUM MUSYAWARAH DUSUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU (STUDI KASUS DESA BANDAR PADANG)
Lokasi Penelitian	: DESA BANDAR PADANG KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 Desember 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan untuk masalah akademik

2. Diarang tidak mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk tujuan komersial atau untuk keuntungan pribadi

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211
Email. info@dpmptsp.inhukab.go.id Website. dpmptsp.inhukab.go.id

RENGAT

SURAT KETERANGAN PENELITIAN NOMOR : 3/DPMPTSP/NON IZIN-SKP/I/2020

Permohonan Surat Keterangan Penelitian (SKP) Nomor - tanggal 13 JANUARI 2020 perihal permohonan Surat Keterangan Penelitian;
Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi Nomor 530/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29151 tanggal 26 DESEMBER 2019

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 601/XII/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

: MUHAMMAD ADNAN
: 11527103078
: SIDOMULYO RT/RW 026/008 DESA/KEL BULUH RAMPAI KEC. SEBERIDA
KAB. INDRAGIRI HULU
: INDONESIA

: PELAKSANAAN FORUM MUSYAWARAH DUSUN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM
PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KECAMATAN
SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU
: DESA BANDAR PADANG KEC. SEBERIDA
: 6 (ENAM) BULAN
: MAHASISWA
: UIN SUSKA RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dilibatkan objek lokasi penelitian.
3. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rengat
Pada tanggal : 13 Januari 2020



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ir. **SUSENO ADJI, MM**
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19601213 198903 1 005

Terbaca dan disahkan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Indragiri Hulu;
2. UIN SUSKA RIAU ;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN SEBERIDA
DESA BANDAR PADANG
Jl. Lintas Selatan Bandar Padang – Kode Pos 29371

SURAT BALASAN PENELITIAN

Nomor : 025/PEM-B.PDG/I/2020

Kepada Yth :
Ketua Jurusan S1 Ilmu Hukum
Bpk. Firdaus, SH
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERMAN**
Jabatan : Kepala Desa Bandar Padang

Menerangkan Bahwa,

Nama : **MUHAMMAD ADNAN**
No. Mhs : 11527103078
Mahasiswa : UIN SUSKA RIAU

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada Instansi Pemerintahan kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

“ PELAKSANAAN FORUM MUSYAWARAH DUSUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU ”

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

Dikeluarkan di Bandar Padang
Pada tanggal 17 Januari 2020

Kepala Desa Bandar Padang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD ADNAN

NPM : 11527103078

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul : *Pelaksanaan Forum Musyawarah Dusun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus Desa Bandar Padang)*

Pembimbing : Muslim S.Ag. S.H., M.Hum

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, Juni 2020

Pimpinan Redaksi

UIN SUSKA RIAU

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010



RIWAYAT HIDUP PENULIS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



MUHAMMAD ADNAN, lahir pada tanggal 23 Mei 1996 di Ngawi. Lahir dari pasangan Tamsir, Sugiyanto dan Suparmi, anak Pertama dari Dua bersaudara. Dengan saudara kandung bernama Vina Fius Solehah, Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 010 Seresam tahun 2009. Dan pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Seberida tahun 2012 kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Seberida tahun 2015. Setelah lulus SMA penulis melanjutkan cita-cita dan meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum. Pada tanggal penulis mengikuti sidang munaqasah dan berhasil menyandang gelas Sarjana Hukum (SH).

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU